

Pendekatan Kreatif dan Efektif : Memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas PAUD

**Suhardi¹, Auliya Nabilah Salwa², Hasna Qurrota A'yuna³,
Raychikal Putri Rianka⁴**

^{1,2,3,4} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: salwanabilaah05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan library research, ini bertujuan untuk menyusun dan mendeskripsikan terkait cara memanfaatkan dana bantuan operasional untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD. Hasil studi ini menunjukkan bahwa program dana BOP mempunyai peran penting upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di PAUD terkhusus sekolah yang dikelola secara signifikan (terstruktur) karena dapat meningkatkan mutu kualitas sekolah di tengah masyarakat. Sebagian besar orang menjawab percaya bahwa program BOP PAUD membantu meringankan biaya operasional pendidikan di sekolah mereka. Masih ada perdebatan tentang seberapa efektif program ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua institusi pendidikan yang memenuhi syarat terdaftar program ini. Metode yang digunakan adalah metode yang menggunakan jenis penelitian yang berupa Studi Kepustakaan Library Research. Analisis dijalankan berdasarkan dari pengumpulan data yang ada.

Kata kunci: *Memanfaatkan Dana, BOP, Meningkatkan Kualitas Layanan*

Abstract

This research is based on library research, it aims to compile and describe how to utilize operational assistance funds to improve the quality of PAUD services. The results of this study show that the BOP funding program has an important role in improving the quality of education services in PAUD, especially schools that are managed in a significant (structured) manner because it can improve the quality of schools in the community. Most people answered that they believed that the BOP PAUD program helped reduce the operational costs of education at their school. There is still debate about how effective this program is in improving the quality of early childhood education. However, further efforts are needed to ensure that all eligible educational institutions are registered for this program. The method used is a method that uses a type of research in the form of Library Research Library Study. Analysis is carried out based on existing data collection.

Keywords : *Using Funds, BOP, Improving The Quality Of Service.*

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan tahapan penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak usia dini melalui berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan fisik, emosional, sosial dan kognitif. Namun biaya operasional PAUD seringkali memberikan beban yang cukup besar bagi lembaga pendidikan, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan program Dukungan Operasional Pendidikan (BOP) yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non-personil sektor pendidikan PAUD.

Bagi suatu negara pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam Pembangunan berkelanjutan bahkan menjadi hal wajib bagi warga negara (Rahmawati et al., 2023) . Secara tegas dijelaskan dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal. Salah satu indikator negara yang maju dilihat dari sumber daya manusia bahkan pendidikan menjadi langkah pertama dan utama bagi setiap negara yang ingin maju (Rahmawati et al., 2023) . PAUD merupakan pendidikan pertama bagi anak bahkan dapat dikatakan sangat fundamental karena perkembangan anak berkembang secara pesat di masa golden age dan masa ini sangat menentukan masa depannya (Rahmawati et al., 2023)

Dalam melaksanakan pendidikan yang optimal, pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yakni diantaranya tidak meratanya kesempatan pendidikan, terbatasnya anggaran pendidikan serta kualitas pendidikan. Maka dari itu pemerintah menetapkan aturan yakni peraturan kementerian agama pada nomor 17 tahun 2010 mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidik. Namun, tantangan keuangan sering kali menjadi penghalang utama dalam penyelenggaraan yang efektif dan berkelanjutan. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menjadi penopang utama untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan PAUD. Namun, pengelolaan dana BOP yang tidak tepat dapat menghambat potensi optimalisasi sumber daya.

Dana bantuan operasional atau disebut BOP salah satu sumber pendanaan terhadap pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia (Indarwati & Murniati, 2024) . Dana BOP secara tidak langsung memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran PAUD. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan BOP pada Pendidikan anak usia dini (PAUD). Artikel ini akan mengeksplorasi strategi dan praktik pengelolaan dana BOP PAUD yang efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan pendekatan terbaik dalam alokasi dan penggunaan dana, diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para pengelola dan pemangku kepentingan PAUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini secara signifikan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 1999 dalam Mirzaqon, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOP)

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 menyatakan bahwa “pengelolaan anggaran pembelajaran berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Petunjuk teknis BOP PAUD diharapkan Satuan Penyelenggaraan PAUD dapat mengelola dananya secara akuntabel. Akuntabel berarti dalam mengelola dana BOP PAUD, Lembaga PAUD yang mendapatkan dana BOP PAUD harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD Dikmas), lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD harus memiliki peserta didik paling sedikit berjumlah 9 sesuai dengan petunjuk teknis (Baidowi, 2020a) .

Kemendikbud Ristek menetapkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama BOP PAUD Reguler yaitu dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Kedua, BOP PAUD Kinerja adalah

Dana BOP PAUD yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang dinilai berkinerja baik (Eko, 2023) .

Tujuan penggunaan Dana BOP, yaitu :

- a) Penggunaan Dana: BOP digunakan untuk menutup biaya operasional non personalia seperti Biaya penyediaan sarana, prasarana, pelatihan personel, dan modal kerja tetap. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pendidikan orang tua terhadap anaknya.
- b) Pengelolaan Dana : Dana BOP harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana BOP dikelola sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat (SMAN63, 2024) .

Dana BOP terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya (Murdianingrum et al., 2020) :

- a) BOP Reguler : PAUD Digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari satuan pendidikan yang memberikan pelayanan. BOP reguler disalurkan dua kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Januari dan akhir bulan Juni.
- b) BOP Kinerja : Digunakan untuk meningkatkan mutu pelatihan pada satuan pendidikan yang memberikan kinerja PAUD unggul. BOP Kinerja hanya disalurkan satu kali dalam setahun.

Implementasi Penggunaan Dana BOP

Sebelum tahun 2019, modal BOP pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan melalui mekanisme dana dekonsentrasi. lalu tepatnya pada tahun 2019, pemerintah mengganti sistem menjadi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik melalui proses transfer dana ke Kecamatan dan Desa (TKDD) Pendanaan BOP merupakan suatu upaya pemerintah dalam memakmurkan berbagai pelaksanaan Pendidikan, yang nantinya akan mempengaruhi mutu sekolah dalam melaksanakan berbagai layanan pendidikan bagi siswa (Nurkolis, 2022) .

Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, objek BOP PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD di Pusat Kegiatan dan Pusat Belajar, serta komunitas belajar. Sasaran BOP tersebut tidak berlaku bagi satuan atau instansi PAUD yang mengenakan biaya atau pungutan melebihi yang berlaku di daerah/kota. Salah satu syarat untuk memperoleh BOP PAUD adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) (Azzahra et al., 2023) .

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana penunjang pendidikan, banyak sekali komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan pengawas, seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan peninjauan pedoman teknis yang ditetapkan pemerintah. Kemudian melalui konsultasi bersama dengan kepala sekolah, bendahara dan dewan guru di lingkungan sekolah akan ditentukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang digunakan dalam penerapan atau kebutuhan program RKAS BOP PAUD yang dipelopori oleh seorang siswa. Bantuan Operasional usulan Dana Pendidikan (BOP). Bantuan Operasional Rencana Aksi Anggaran Sekolah Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, terkait apa yang diusulkan dalam usulan RKAS BOP PAUD selama satu tahun ke depan. Dan kepala sekolah ini merupakan kunci dalam merencanakan apa yang dikomunikasikan secara sosial dan terkait hal yang akan dibicarakan kepada komunitas sekolah. Pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) didasarkan pada kesepakatan dan keputusan antara pengurus BOP sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber pendapatan di BOP PAUD. RKAS, kecuali dana yang diterima dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

Penggunaan neraca pembayaran dan dana lainnya harus disampaikan secara tertulis dalam dokumen acara rapat, yang dilampiri dengan tanda tangan semua yang ikut serta dalam rapat. Dengan mengelola Dana Penunjang Kegiatan Pendidikan (BOP) selama satu tahun, mereka menerima dana BOP yang bersifat satu kali dari negara, yang mereka terima dari masing-masing daerah, dimana dana tersebut dibayarkan dua kali dalam setahun. Menurut pihak administrasi, disepakati penyaluran dana dibagi sesuai rencana awal, 30%

akan diberikan kepada guru sebagai uang muka dan 70% akan digunakan untuk membeli dana yang telah ditentukan diantaranya untuk: mendukung kegiatan belajar siswa, pendanaan (APE) serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. (Ramadhani et al., 2023) .

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah tempat perencanaan pengelolaan dana BOP dimulai. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS) dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di PAUD tersebut, didasarkan pada jumlah peserta didik dan kebutuhan operasional PAUD. RKAS juga dilengkapi dengan rencana rinci tentang penggunaan dana BOP PAUD yang diterima PAUD. Ada 32 peserta didik di PAUD tersebut. Juknis BOP PAUD menetapkan jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap peserta didik sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun. Sebagaimana diatur dalam Juknis BOP PAUD, Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disampaikan kepada komunitas. Namun, di PAUD tersebut, hal itu jarang terjadi karena masyarakat di sekitar PAUD tidak peduli dengan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah dan komite jarang mengadakan pertemuan di mana orang tua dan wali peserta siswa hadir.

Penyesuaian Penggunaan Dana BOP

Ada beberapa langkah dalam mengalokasikan dana BOP, sebagai berikut (Ri, 2015) :

- a) Pimpinan BOP pusat melakukan pendataan jumlah siswa di setiap kabupaten/daerah melalui tim pimpinan BOP provinsi. Nama, tempat, tanggal lahir hendaknya dicantumkan pada rincian mahasiswa yang telah mendapat BOP. alamat dan informasi lain sesuai formulir yang diberikan.
- b) Berdasarkan data jumlah mahasiswa di setiap daerah/kota, Pemerintah Pusat BOP menetapkan alokasi dana BOP kepada PAUD di setiap provinsi sesuai DIPA kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
- c) Bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi yang jumlah PAUD-nya banyak, dana BOP PAUD dapat diperoleh melalui DIPA Departemen Agama kabupaten/Kota.
- d) Setelah menerima inventarisasi neraca pembayaran dari pimpinan bank sentral, tim pengelola provinsi/pemerintah/kota melakukan pengecekan kembali terkait data jumlah siswa per PAUD untuk mengetahui sebarannya di setiap PAUD.
- e) Memperhatikan anggaran pengalokasian yang harus dikeluarkan dalam satu tahun untuk setiap PAUD

Penyaluran dan Pengambilan Dana BOP: Syarat penyaluran dana BOP PAUD tentunya lembaga harus memiliki izin operasional, mempunyai NPWP, serta mempunyai rekening biasa atas nama PAUD/lembaga (tidak boleh atas nama perorangan atau yayasan) kemudian data tersebut dikirim ke pemerintah /Tim Pengurus BOP Kota, Tim Pengurus BOP Provinsi/Kabupaten/Kota nantinya akan dilakukan validasi untuk perbandingan nomor rekening PAUD. komponen pembiayaan: Pembelian/pasokan buku bacaan anak, pembelian alat tulis untuk kegiatan pendidikan, pembelian alat peraga, pembelian stok bahan baru, penyelenggaraan kegiatan pengembangan siswa, pemesanan makanan dan jasa lainnya, penerimaan siswa baru, biaya observasi tumbuh kembang, biaya perbaikan gizi anak atau gizi tambahan.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan program BOP PAUD, setiap pengelola program di setiap tingkat (pusat, provinsi/provinsi/kota) wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. PAUD harus memuat rencana penerimaan dan penggunaan dana dari seluruh sumber keuangan yang diterima RKARA ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah PAUD dan disetujui oleh ketua yayasan atau panitia PAUD. Dokumen ini di PAUD disimpan dan ditunjukkan kepada supervisor, untuk memeriksa lainnya jika diperlukan. RKARA dilakukan setahun sekali pada awal tahun ajaran, namun harus ditinjau ulang pada semester kedua. Oleh karena itu, PAUD dapat menyiapkan formulir tahunan terperinci seperti formulir (BOP-06) sesuai semesternya. RKARA harus dilengkapi dengan rencana aksi rinci yang disusun secara tahunan dan semesteran untuk setiap sumber pendanaan yang diterima lembaga (Rohiyatun, 2018) .

PAUD harus menyimpan catatan dana yang dihimpun khusus untuk program BOP. Buku-buku yang digunakan adalah:

- 1) Buku kas umum (BOP-07) Buku kas umum disiapkan untuk setiap rekening bank milik PAUD. Akuntansi buku kas umum mencakup seluruh transaksi luar yaitu transaksi pihak ketiga yang meliputi: (a) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOP atau sumber dana lainnya), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan dari jasa transfer bank., (b) Blok konsumsi: pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, layanan giro, pajak penghasilan, dan setoran pajak. Buku kas umum ini harus dilengkapi untuk setiap transaksi (segera setelah transaksi terjadi, tidak menunggu satu minggu untuk ditarik). Transaksi-transaksi yang dicatat dalam buku kas umum juga harus dimasukkan dalam buku-buku pembantu yaitu buku kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh bendahara BOP dan direktur PAUD. Dokumen ini disimpan di PAUD dan ditunjukkan kepada Pembina RA, Kepala Dinas Pendidikan Madras, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pemeriksa lainnya jika perlu.
- 2) Buku kas (BOP-08) Buku cabang kasir bertujuan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dari transaksi yang dilakukan secara tunai. Buku Kasir ini harus mencatat setiap transaksi dan harus ditandatangani oleh Bendahara dan Manajer PAUD. Dokumen ini disimpan di PAUD dan diperlihatkan kepada pengawas, Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan pemeriksa lainnya bila diperlukan. Dalam pembukuan dana yang dihimpun PAUD untuk program BOP perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan secara manual atau komputer. Apabila pembukuan dilakukan dengan komputer, maka bendahara wajib mencetak buku kas umum dan buku referensi paling sedikit sebulan sekali dan mengelola buku kas umum bulanan yang dicetak, yang ditandatangani oleh ketua PAUD dan bendahara PAUD.
 - b) Seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran dicatat di kas umum dan di buku register masing-masing anak perusahaan sesuai urutan tanggal transaksinya.
 - c) bendahara menutup buku kas umum dan buku pembantu setiap akhir bulan, dan disetujui oleh ketua PAUD.
 - d) Tunai tidak melebihi Rp 10 juta.
 - e) Apabila terdapat kesalahan penulisan angka/huruf, maka kesalahan tersebut harus dicoret dengan dua garis yang rapi, agar kesalahan penulisan semula masih dapat terbaca dan kemudian dicatat.
 - f) Apabila pada bulan berjalan tidak terjadi transaksi pengeluaran/penerimaan, maka pembukuan bulan tersebut tetap NIHIL yang ditandatangani oleh bendahara dan dikukuhkan oleh direktur RA.
 - g) Apabila kasir berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya, buku kas umum dan buku pembuktiannya serta kwitansi pengeluaran harus diserahkan kepada pegawai baru dengan protokol mutasi.

Setiap transaksi pengeluaran harus dibuktikan dengan kuitansi yang sah. Surat bukti pengeluaran sejumlah uang tertentu harus bermaterai cukup sesuai dengan peraturan bea materai. Transaksi dengan nilai Rp 250.000 dibebaskan bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000 dikenakan bea materai Rp 3.000 dan transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp 1.000 dikenakan bea cukai. pajak sebesar Rp1.000000000. Petunjuk Teknis BOP, uraian pembayaran pada tanda terima harus jelas dan rinci sesuai dengan tujuannya. Uraian jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisahkan dalam bentuk invoice yang ditempelkan pada kuitansi setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh Kepsek PAUD dan dibayar lunas oleh Bendahara. Pihak Lembaga/PAUD harus menyimpan semua jenis penerimaan pengeluaran sebagai bukti dan bahan pelaporan(Rohiyatun, 2018) .

Kelebihan dan Kekurangan Dana BOP

Ada beberapa kelebihan dari Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP):

- a) Menyeimbangkan Arus Keuangan.
- b) Dengan adanya BOP, suatu negara dapat memantau arus keuangan dari dan ke luar negeri dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyeimbangkan arus tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketahanan ekonomi pada masa krisis ekonomi global.
- c) Alat Prediksi Ekonomi BOP juga dapat digunakan sebagai alat prediksi ekonomi yang berguna dalam membantu pemerintah merencanakan kebijakan ekonomi dalam pendidikan maupun lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- d) Menjaga Stabilitas Nilai Tukar. BOP dapat juga membantu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara dengan memantau arus masuk dan keluar dana dari suatu negara lainnya.

Adapun kekurangannya sebagai berikut:

- a) Tidak Menggambarkan Kesejahteraan Masyarakat. BOP hanya mencakup transaksi keuangan antar negara dan tidak memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat. Dalam artiannya BOP tidak dapat menggambarkan kemakmuran seseorang atau masyarakat di dalam suatu negara.
- b) Keterbatasan Kategori. BOP dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu, neraca perdagangan, neraca modal, dan neraca pembayaran. Meskipun sudah ada kategori yang jelas, BOP masih memiliki keterbatasan terkait jenis transaksi yang dicakup.
- c) Neraca perdagangan yaitu mencatat seluruh transaksi impor dan ekspor barang dari suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu. b) Neraca pembayaran adalah catatan akuntansi dari seluruh transaksi keuangan antara suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu dan biasanya setahun.
- d) Neraca modal yaitu mencatat seluruh investasi dari suatu negara ke negara lainnya selama periode yang ditentukan.
- e) Memerlukan Data yang Akurat. BOP memerlukan data yang akurat untuk memberikan gambaran yang benar dan lengkap mengenai arus keuangan suatu negara. Tanpa data yang akurat, BOP dapat memberikan hasil yang salah dalam mendukung kebijakan pemerintah dan dapat menyebabkan korupsi atas kelalaian data yang tidak akurat.

Kendala Penggunaan Dana BOP

Prosedur yang rumit dan tugas administratif yang panjang seringkali menunda pencairan dana, sehingga berdampak negatif terhadap operasional PAUD. Selain itu, terbatasnya akses terhadap layanan perbankan juga menyulitkan penerima, terutama di daerah terpencil. Proses pencairan dana BOP sebelumnya seringkali menghadapi berbagai kendala birokrasi dan penundaan sehingga mengakibatkan dana tidak dimanfaatkan secara maksimal di sekolah. Berdasarkan temuan efektivitas dukungan administratif penyelenggaraan PAUD, analisis efisiensi pendanaan menunjukkan bahwa pendanaan dukungan administratif penyelenggaraan PAUD masih tertinggal di sebagian besar wilayah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendataan dan alokasi dana, peraturan subsidi daerah, dan birokrasi daerah. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOP PAUD menjadi dua tingkat penyaluran pada tahun 2019 juga menjadi faktor yang mempengaruhi efisiensi pencairan dana (Indarwati & Murniarti, 2024).

Selain terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya tenaga pendukung kegiatan pengelolaan sekolah, sifat kualifikasi pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan serta terbatasnya jumlah guru menyebabkan sulitnya memperoleh sumber yang setara dari luar sekolah yang memerlukan instruktur. Manajemen tidak profesional, hal tersebut menjadi beberapa faktor penghambat penggunaan dana BOP di sekolah (Lestari et al., 2022). Jarak yang cukup jauh antara lokasi Biro Pelayanan Pajak (KPP) dengan Biro Pelayanan Pertimbangan dan Permusyawaratan Pajak (KP2KP), kurangnya interaksi perpajakan dari KPP, dan sumber daya manusia (SDM) PAUD serta sarana dan prasarana perpajakan yang

kurang lembaga dan tenaga keuangan PAUD masih terbatas. Berbagai kesalahan tersebut disebabkan oleh adanya kegagalan teknis dan non teknis yang menyimpannya, yaitu kegagalan teknis terkait penggunaan teknologi berbasis komputer dan kegagalan non teknis terkait kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh bendahara (Khalida & Setiawan, 2021).

Faktor pendukung dan Penghambat Dana BOP

Faktor Pendukung. Faktor yang mendukung penggunaan dana BOP antara lain kebijakan pemerintah mengenai pedoman BOP, dukungan Kementerian Pendidikan terhadap penyelenggara BOP dan diantaranya (Luthfia et al., 2023):

- a) Komunikasi. Unsur komunikasi yang baik antara pengelola dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana BOP. Komunikasi yang terbuka dan sering membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan dana BOP.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia seperti akuntan juga menjadi faktor pendukung. Bendahara yang berkompeten dapat membantu mengelola dana BOP dengan baik dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Baidowi, 2020b).
- c) Keterlibatan Masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap kemajuan pendidikan juga menjadi unsur pendukung. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan PAUD (Kemdikbud, 2020).
- d) Kualitas Pelatihan Guru. Kualitas pelatihan guru juga mempengaruhi penggunaan dana BOP. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat membantu merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan sekolah (Yunita Murdianingrum & Sudiyono, Agus Amin Sulistiono, 2020).
- e) Penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Sarana dan prasarana yang baik membantu meningkatkan kualitas belajar dan bermain anak.

Faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Dana BOP melibatkan kendala dalam sosialisasi pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, prosedur pencairan dana BOP seringkali dianggap rumit dan memberatkan bagi satuan paud, masalah administrasi keuangan di sekolah, dan ketidaksesuaian penyaluran dana dengan rencana. Ketidakpahaman guru terkait sosialisasi pelatihan menjadi salah satu kendala utama, dan hanya sebagian kecil guru yang memahami materi pelatihan (Luthfia et al., 2023). Kemalasan pelaksana dalam penggunaan sumber daya dan pelaporan dapat menimbulkan disinsentif. Faktor-faktor yang menghambat penggunaan dana BOP untuk pendidikan antara lain;

- a) Kurangnya komunikasi antar pelaksana menimbulkan keraguan terhadap pelaksanaan. Meskipun pelaksanaan pengawasan memerlukan kerja sama tim dan harus dilakukan secara bersama-sama, sulit bagi pelaksana pengawasan untuk mempunyai waktu yang diperlukan pada waktu yang bersamaan,
- b) Kurangnya tenaga pengawas, padahal jumlah sekolah yang akan diawasi banyak dan sumber daya yang tersedia tidak memiliki keterampilan yang sama (Yuniarini et al., 2019).

Efek negatif dari faktor penghambat, faktor ini dapat menyebabkan:

- a) Penggunaan Dana BOP yang Tidak Efektif Dana BOP tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD.
- b) Hambatan dalam mencapai tujuan program, tujuan program BOP. Sesuatu seperti Peningkatan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan belum dapat dicapai secara optimal.
- c) Munculnya inefisiensi dan penyalahgunaan dana, keterlambatan pencairan, prosedur yang rumit, dan kurangnya pengawasan dapat menciptakan peluang terjadinya inefisiensi dan penyalahgunaan dana.

Strategi Memaksimalkan Penggunaan Dana BOP

Strategi Memaksimalkan Penggunaan Dana Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) mencakup beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- a) Pengelolaan Dana yang Efisien. Peningkatan efisiensi pengelolaan dana BOP PAUD merupakan langkah penting menuju optimalisasi dana pendidikan, efisiensi ini mencakup pemantauan yang tepat terhadap penggunaan dana, pemantauan pengeluaran yang ketat, dan pemilihan prioritas yang tepat dalam pengeluaran anggaran.
- b) Optimalisasi Penggunaan Dana. Dana BOP PAUD digunakan untuk keperluan pribadi dan kegiatan penunjang lainnya bagi anak yang mengikuti PAUD untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan pendidikan. Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan usulan yang direncanakan bersama untuk kepentingan sekolah (HendroTriat, 2023).
- c) Transparansi dan Akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang baik tidak terlepas dari prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- d) Kerjasama dan Akuntabilitas. Kerja sama antara sekolah, orang tua siswa, dewan guru, dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana. Transparansi penggunaan dana harus dijaga dan semua pihak harus mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan sebelum anggaran dibuat (Muryadi, 2021).
- e) Peningkatan Pendanaan. Melalui Program Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mempercepat dan meningkatkan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Setara. Kebijakan ini meningkatkan fleksibilitas pendanaan karena dihitung berdasarkan Indeks Biaya Konstruksi (IKK) dan Indeks Kemahasiswaan (IPD) setiap kabupaten/kota dan menerapkan dasar biaya yang seragam untuk seluruh daerah (pengelola web kemendikbud, 2022).
- f) Penyaluran dana yang cepat. Penyaluran dana BOP yang cepat membantu pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Penyaluran dana yang cepat memungkinkan lembaga melancarkan kegiatan pembelajaran lebih cepat dan mengurangi beban administrasi (GTK, 2022)

SIMPULAN

Biaya operasional PAUD seringkali memberikan beban yang cukup besar bagi lembaga pendidikan, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah Indonesia memperkenalkan program Dukungan Operasional Pendidikan (BOP) yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional non-manusia pada sektor pendidikan PAUD. Dana BOP digunakan untuk mendanai BOP reguler yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari satuan pendidikan penyelenggara layanan PAUD, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dinilai berkinerja tinggi. BOP PAUD yang dituju meliputi PAUD, kelompok bermain, satuan PAUD pusat kegiatan dan pembelajaran, serta komunitas belajar. Transaksi-transaksi yang tercatat pada buku kas umum juga harus dimasukkan ke dalam subledger yaitu buku kas, subledger bank, dan subledger lainnya, untuk menjamin keberlangsungan dan mutu layanan pendidikan PAUD, pengelolaan dana BOP PAUD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan lancar. Ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya saya sampaikan kepada Bapak Suhardi, dosen penanggung jawab Mata Kuliah Manajemen PAUD, atas bimbingan dan motivasinya selama perkuliahan dan pembuatan artikel ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada habisnya, serta semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam pembuatan buku harian ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang dari para pembaca. Penulis berharap artikel ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, S., Narda, A. D., Heryawan, S. P., & Rejeki, P. W. A. (2023). Program BOP Paud dan Efektifitasnya bagi Paud Di daerah Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 408–413.
- Baidowi, A. (2020a). Implementasi Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Program Bantuan Operasional PAUD di Masa Pandemi Covid-19. *GENIUS: Indonesian Journal of Early Childhood Education*, 1(2), 141–157.
- Baidowi, A. (2020b). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal of Educational Management*, 85–102.
- Eko. (2023). *BOP Kinerja PAUD Diberikan Sekali Bulan April 2023, BOP Reguler Disalurkan Dua Tahap Januari dan Juni*. Paudpedia.Kemdikbud.Go.Id. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/bop-kinerja-paud-diberikan-sekali-bulan-april-2023-bop-reguler-disalurkan-dua-tahap-januari-dan-juni?do=MTQyOC0zZjUwNjMzMQ==&ix=MTETYmJkNjQ3YzA=#:~:text=%22Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidid>
- GTK, S. (2022). *Akselerasi dan Peningkatan Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Diapresiasi Warga Sekolah*. Gtk.Kemdikbud.Go.Id. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/akselerasi-dan-peningkatan-dana-bop-paud-dan-pendidikan-kesetaraan-diapresiasi-warga-sekolah>
- HendroTriat, A. (2023). *permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan*. Slideshare.Net. <https://www.slideshare.net/slideshow/kebijakan-bop-paud-2023pptx/259331192>
- Indarwati, Y., & Murniarti, E. (2024). Analisis Proses Pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 70–80.
- Kemdikbud. (2020). Efektivitas Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Pskp.Kemdikbud.Go.Id*.
- Khalida, M. S., & Setiawan, B. (2021). Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah KPP Pratama Tegal. *Educoretax*, 1(2), 104–127.
- Lestari, G., Sunu, I., & Ariawan, I. P. W. (2022). Evaluasi Sistem Penggunaan DAK Nonfisik Kesetaraan Tahun 2021 Pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Jembrana. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 13(2), 178–187.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486–29490.
- Murdianingrum, Y., Sudiyono, S., Sulistiono, A. A., & Perdana, N. S. (2020). *Efektivitas bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini*. Pusat Penelitian Kebijakan.
- Muryadi, M. (2021). Bantuan Operasional Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Anak Dini. *Jurnal Hukum Legalita*, 3(1), 30–44.

- Nurkolis, C. E. (2022). *Kajian costing dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Konfisis Bantuan Oprasional Penyelenggaraan (BOP)*. kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- pengelola web kemendikbud. (2022). *Peningkatan Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai Karakteristik Daerah*. Kemdikbud.Go.Id. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/peningkatan-dana-bop-paud-dan-pendidikan-kesetaraan-sesuai-karakteristik-daerah>
- Rahmawati, I., Alike, P., & Rosmilawati, I. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Di Dinas Pendidikan Kota Tangerang. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(02), 126–135.
- Ramadhani, R. A., Octaviana, D. R., Fadlilah, K., & Pratama, F. Y. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Lembaga PAUD. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 89–100.
- Ri, K. A. (2015). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Raudhatulathfal(RA). *Jaktim.Kemenag.Go.Id*.
- Rohiyatun, B. (2018). Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Efektif pada Pelaksanaan Program Kegiatan PAUD Rinjani Sebagai Lembaga Trifungsi Pendidikan (TPA, KB dan TK). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 4(1), 173–183.
- SMAN63. (2024). *Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)*. Sman63jkt.Sch.Id. <https://sman63jkt.sch.id/2015/01/07/program-bantuan-operasional-pendidikan-bop/>
- Yuniarini, P. D., Agung, A. A. G., & Dantes, K. R. (2019). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Penyelenggaraan (BOP) Paket C Pada Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM) Widya Sentana Kabupaten Badung Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 10(2), 132–137.
- Yunita Murdianingrum, & Sudiyono, Agus Amin Sulistiono, N. S. P. (2020). *Efektivitas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini* (2020th ed.). Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.